

Ikhsa Syiatul Ikhsaniya, Moh. Kusno, Putri Diana Nur Jamila, Syafiqa Nur Hidayah,  
Pendidikan Islam dalam Sistem Demokrasi Terpimpin: Tantangan Ideologis dan  
Adaptasi

## PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN: TANTANGAN IDEOLOGIS DAN ADAPTASI

<sup>1</sup> Ikhsa Syiatul Ikhsaniya, <sup>2</sup> Moh. Kusno, <sup>3</sup> Putri Diana Nur Juanila, <sup>4</sup> Syafiqa Nur  
Hidayah

<sup>1234</sup> Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Kranji Paciran, Lamongan

E-mail:

[iksasiya21@gmail.com](mailto:iksasiya21@gmail.com)

[kusno@iai-tabah.ac.id](mailto:kusno@iai-tabah.ac.id)

[putrinurdianajuanila@gmail.com](mailto:putrinurdianajuanila@gmail.com)

[halimfika5@gmail.com](mailto:halimfika5@gmail.com)

**Abstract:** *The democratic leadership period (1959-1965) is a crucial period in Indonesia's political history that directly affects the development of national educational systems, including islamic education. The study aims to examine the dynamics of islamic education in a context of ideological pressures and changing political systems of the day. The main issues discussed include islamic education conditions in the democratic era of leadership, ideological challenges arising from the battle of influence between nationalists, communists, and Islam, and adaptation strategies by islamic education institutions in response to political and ideological pressures. The study USES a historical qualitative approach with document and literature analysis as a method for data collection. Research indicates that islamic education at this time faces significant pressure from a regime with centralized power and uniformity of national ideologies. Islamic education institutions are required to adjust, both in the institutions and content of the curriculum. Adaptive strategies include the integration of nationalistic values in curriculum, adjustments to government policies, and improved social-political networks to sustain the existence of islamic institutions. To put it simply, despite strong ideological and political pressures, the islamic institution of democracy was guided to new power.*

**Keywords:** *Islamic Education, Guided Democracy, Ideology, Adaptation, History of Education*

### Pendahuluan

Menurut Theodore Mayer Greene mendefinisikan pendidikan sebagai usaha manusia untuk menyiapkan dirinya untuk suatu kehidupan yang bermakna. <sup>1</sup> Sedangkan kata Islam merupakan turunan dari kata *assalmu, assalamu, assalamatu*

---

<sup>1</sup> A Rusdiana, "Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023," 2023, 89–104.

yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Makna lain dari turunan Islam adalah “damai” atau “perdamaian” (al-salmu/peace) dan “keamanan”.<sup>2</sup>

Abdurrahman Saleh Abdullah menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh dipandang sebagai proses pemaksaan dan pengekan secara individual terhadap peserta didik. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu dengan penghargaan terhadap kemampuan peserta didik, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Dalam proses pembelajaran harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, sarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan.<sup>3</sup>

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pendidikan Islam pada masa Demokrasi Terpimpin adalah upaya negara untuk menyatukan pendidikan dengan ideologi nasional yang dianut. Pemerintah pada masa itu berusaha mengintegrasikan berbagai ideologi yang ada dengan tujuan memperkuat persatuan nasional, termasuk dengan menyingkirkan ideologi yang dianggap bertentangan dengan cita-cita Pancasila. Ketegangan ideologis antara kelompok nasionalis, komunis, dan Islam menjadi salah satu hambatan utama dalam hubungan antara negara dan lembaga pendidikan Islam.<sup>4</sup> Pendidikan Islam yang memiliki karakteristik religius yang kuat harus berhadapan dengan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan ideologi negara yang lebih mengutamakan kesatuan. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam berusaha mempertahankan nilai-nilai agama sambil menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah yang semakin menekankan pentingnya persatuan ideologi.

Untuk tetap eksis dan berkembang dalam situasi yang penuh tantangan, lembaga pendidikan Islam melakukan berbagai penyesuaian, baik dalam struktur kelembagaan maupun dalam kurikulumnya. Secara kelembagaan, lembaga-lembaga ini mulai mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap pemerintah pusat, meskipun tetap menjaga esensi keagamaan yang menjadi dasar operasional mereka. Lembaga-lembaga ini berusaha untuk tetap relevan dalam sistem pendidikan nasional yang semakin terpusat dengan cara menyesuaikan kurikulum mereka agar tetap dapat memenuhi kebutuhan zaman, tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam yang mereka anut.<sup>5</sup> Dalam hal ini, pendidikan Islam harus menemukan keseimbangan antara

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Rahmat Hidayat et al., “Demokrasi Pendidikan Islam (Dan Analisis Pengembangannya),” *Educational Journal of Islamic Management* 3, no. 1 (2023): 13–26, doi:10.47709/ejim.v3i1.2294.

<sup>5</sup> Ibid.

mempertahankan tradisi dan mengikuti tuntutan modernisasi yang datang dari negara, tanpa menghilangkan identitas agama yang melekat pada mereka.

Tantangan ideologis yang dihadapi pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada hubungan dengan negara, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan otoritas dan kebebasan dalam menyampaikan ajaran Islam kepada generasi muda. Pesantren-pesantren yang berbasis pada pengajaran kitab kuning dan ajaran agama harus berhadapan dengan tantangan ideologis baru, baik dari perkembangan komunisme yang mulai mendapat tempat di Indonesia, maupun dari dominasi gerakan-gerakan nasionalis dalam politik negara. Ketegangan ideologis ini menempatkan pendidikan Islam pada posisi yang sulit, di antara mempertahankan tradisi keagamaan dan menghadapi tuntutan negara untuk memperkuat ideologi nasional yang seragam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam harus beradaptasi tidak hanya dalam kurikulum, tetapi juga dalam metode pengajaran dan struktur organisasi mereka untuk bertahan dalam keadaan yang penuh tekanan.

Secara keseluruhan, kajian literatur menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki landasan filosofis yang kuat, baik dari segi makna pendidikan itu sendiri sebagai proses pembentukan manusia yang bermakna (Greene), maupun dari perspektif nilai-nilai Islam yang menekankan pada kedamaian, kebersihan jiwa, dan keselamatan lahir batin. Pandangan Abdurrahman Saleh Abdullah menegaskan pentingnya pendekatan demokratis dalam pendidikan, dengan menolak sistem pembelajaran yang mengekang dan menekankan penghargaan terhadap potensi peserta didik. Dalam konteks sejarah, masa Demokrasi Terpimpin menjadi periode kritis bagi pendidikan Islam karena harus menghadapi tekanan ideologis dari negara yang berupaya menyatukan pendidikan dengan ideologi nasional. Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti ketegangan antara pendidikan Islam dan tuntutan negara, namun belum banyak yang secara khusus mengkaji strategi adaptasi kelembagaan dan kurikulum pendidikan Islam sebagai bentuk respons terhadap tekanan ideologi negara dalam konteks pembentukan identitas nasional. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana lembaga pendidikan Islam mempertahankan nilai-nilai religius sembari menyesuaikan diri dengan tuntutan ideologis negara pada masa Demokrasi Terpimpin, sebagai dasar untuk memahami dinamika pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan politik dan ideologi negara.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan pendekatan kualitatif yang mengandalkan sumber tertulis sebagai data utama. Dalam penelitian ini, informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan melakukan tinjauan mendalam terhadap berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, publikasi penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan, guna membangun dasar teori yang kuat. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan membandingkan berbagai pandangan dalam literatur yang ada, serta mengidentifikasi kekosongan pengetahuan yang perlu diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, metode ini memberikan landasan yang solid dalam pengembangan argumen penelitian dan perumusan kerangka teori yang komprehensif.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Konteks Pendidikan Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa krisis tahun 1957, langkah awal menuju bentuk pemerintahan yang disebut Soekarno sebagai "Demokrasi Terpimpin" mulai diambil. Sistem ini lahir sebagai respons atas situasi darurat dan tidak memiliki bentuk yang tetap, melainkan terus mengalami perubahan seiring waktu. Periode ini menjadi salah satu fase paling tidak stabil dalam sejarah Indonesia setelah masa Revolusi, ditandai oleh dinamika politik yang penuh ketidakpastian.<sup>6</sup>

Dari paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa, pada masa krisis tahun 1957, Soekarno mulai menerapkan sistem pemerintahan baru yang dikenal sebagai "Demokrasi Terpimpin". Sistem ini muncul sebagai cara untuk mengatasi situasi darurat saat itu. Namun, bentuknya tidak tetap dan terus berubah sesuai kondisi. Masa ini menjadi salah satu periode paling tidak stabil dalam sejarah Indonesia

---

<sup>6</sup> Mae Munah et al., "Dinamika Islam Di Indonesia: Kebijakan Politik Terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pasca Merdeka-Reformasi," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 18, no. 1 (2022), doi:10.31000/rf.v18i1.6058.

setelah kemerdekaan, karena situasi politik yang sering berubah dan penuh ketidakpastian.

Demokrasi Terpimpin merupakan gagasan yang dikembangkan oleh Soekarno sebagai respons terhadap ketidaksesuaian model demokrasi liberal yang saat itu dianut dengan realitas sosial Indonesia. Menurut Soekarno, keberagaman etnis, agama, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia membutuhkan bentuk demokrasi yang lebih sesuai dengan karakter masyarakatnya. Ia menilai bahwa sistem pemerintahan sebaiknya dipimpin oleh kelompok yang memiliki wawasan dan pendidikan tinggi, yakni kaum intelektual, agar arah pembangunan bangsa dapat terfokus pada pencapaian tujuan nasional yang lebih besar dan menyeluruh.<sup>7</sup>

Jadi, Demokrasi Terpimpin adalah gagasan Soekarno untuk menggantikan sistem demokrasi liberal yang dianggap tidak cocok dengan kondisi Indonesia yang beragam. Soekarno percaya bahwa Indonesia membutuhkan sistem yang lebih sesuai dengan budaya dan masyarakatnya, di mana pemerintahan dipimpin oleh orang-orang yang berpendidikan dan berpikiran luas, agar pembangunan negara bisa berjalan lebih terarah dan menyeluruh.

Seiring dengan perkembangan proses demokratisasi di Indonesia, muncul sebuah konsep yang dikenal sebagai "demokrasi religius". Konsep ini mencoba menggabungkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dengan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang ada di Indonesia. Istilah "religius" dalam konteks ini merujuk pada semua agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Menurut pemikiran Masykuri Abdillah, demokrasi religius memiliki sejumlah karakteristik utama, antara lain: (1) kehendak rakyat idealnya tidak bertentangan dengan

---

<sup>7</sup> Deby Abiyanto Saputra, Nur Azizah, and Panggi Syarwi, "K.H Saifuddin Zuhri, Dinamika Islam Moderat, Dan Demokrasi Terpimpin," *Communitarian : Jurnal Prodi Ilmu Politik* 5, no. 1 (2023): 805–19, <https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/433>.

prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) setiap keputusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral di hadapan manusia maupun secara spiritual di hadapan Tuhan; (3) orientasi individu tidak hanya terfokus pada hak-hak pribadi, tetapi juga mencakup pemenuhan kewajiban; serta (4) adanya upaya menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif, serta antara nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai spiritual.<sup>8</sup>

Disimpulkan bahwa demokrasi religius adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal Indonesia. Konsep ini mencakup semua agama yang diakui secara resmi oleh negara. Menurut Masykuri Abdillah, demokrasi religius memiliki ciri-ciri penting, seperti: keinginan rakyat sebaiknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, keputusan publik harus bertanggung jawab secara moral dan spiritual, masyarakat harus seimbang antara hak dan kewajiban, serta ada keseimbangan antara kepentingan pribadi, kepentingan bersama, dan nilai-nilai keagamaan.

Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, para tokoh politik Muslim nasional telah menunjukkan perhatian besar terhadap pentingnya pendidikan agama. Mereka secara aktif mendorong lahirnya kebijakan yang dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pendidikan Agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan formal. Komitmen ini tercermin, salah satunya, dari hasil Rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada 27 Desember 1945 yang merekomendasikan agar pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum. Rekomendasi tersebut juga menekankan perlunya pengaturan yang cermat serta perhatian serius dari pemerintah, tanpa mengurangi prinsip kebebasan dalam pendidikan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Munah et al., "Dinamika Islam Di Indonesia: Kebijakan Politik Terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pasca Merdeka-Reformasi."

<sup>9</sup> Hamka Hamka, "Dinamika Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum," *Scolae: Journal of Pedagogy* 1, no. 1 (2018): 92–100, doi:10.56488/scolae.v1i1.16.

Dapat disimpulkan bahwa, sejak Indonesia merdeka, para tokoh politik Muslim sangat peduli terhadap pentingnya pendidikan agama. Mereka mendorong agar ada aturan resmi yang mendukung pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Hal ini terlihat dari hasil rapat BPKNIP pada 27 Desember 1945 yang menyarankan agar pelajaran agama dimasukkan ke dalam kurikulum, dengan pengaturan yang jelas dari pemerintah, namun tetap menghormati kebebasan dalam pendidikan.

Terkait penyelenggaraan pendidikan Islam, terlebih dahulu perlu ditelusuri kebijakan umum serta kebijakan khusus dalam sistem pendidikan nasional saat itu. Hal ini penting karena pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional di era tersebut. Selain itu, dalam menelaah dinamika politik pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia, penting untuk disadari bahwa pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa melawan penjajahan. Seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik karena menyangkut kepentingan masyarakat luas serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.<sup>10</sup>

Jadi, untuk memahami pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan, kita perlu melihat kebijakan umum dan khusus dalam sistem pendidikan nasional saat itu. Pendidikan Islam merupakan bagian penting dari sistem pendidikan negara, dan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa melawan penjajahan. Semua kebijakan yang dibuat terkait pendidikan Islam termasuk dalam kebijakan publik karena menyangkut kepentingan rakyat banyak dan masa depan bangsa Indonesia.

Sejak awal kemerdekaan, para pemimpin politik Muslim di Indonesia telah menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya pendidikan agama. Mereka secara aktif mendorong lahirnya kebijakan yang dapat menjadi

---

<sup>10</sup> Nadhif Muhammad Mumtaz, "Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 414, file:///E:/Kebijakan Pendidikan/kebijakan pendidikan menurut KH. Zenal Arifin.pdf.

dasar hukum bagi pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di institusi pendidikan formal. Salah satu bukti konkret dari upaya ini adalah hasil Rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada 27 Desember 1945, yang merekomendasikan agar pendidikan agama dimasukkan ke dalam kurikulum nasional. Rekomendasi tersebut juga menegaskan pentingnya pengaturan yang cermat serta perlunya perhatian serius dari pemerintah, tanpa mengabaikan prinsip kebebasan dalam pendidikan. Berdasarkan landasan tersebut, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan saat itu memutuskan untuk memasukkan mata pelajaran Pendidikan Agama ke dalam kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang untuk pertama kalinya diterapkan sejak Indonesia merdeka.<sup>11</sup>

Disimpulkan bahwa, sejak awal kemerdekaan, para pemimpin Muslim Indonesia sudah menyadari pentingnya pendidikan agama. Mereka mendorong agar pelajaran agama Islam masuk ke dalam kurikulum sekolah. Hasil rapat BPKNIP tahun 1945 mendukung hal ini dan meminta agar pemerintah mengatur pendidikan agama dengan baik, tanpa menghilangkan kebebasan dalam belajar. Karena itu, pelajaran agama Islam mulai dimasukkan ke dalam kurikulum SMP untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka.

Sebagaimana yang berlaku di tingkat Sekolah Dasar (SD), penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga menjadi tanggung jawab Departemen Agama, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Guru-guru agama, termasuk yang menjadi bagian dari staf pengajar di sekolah, ditempatkan dan diangkat langsung oleh Departemen Agama.
2. Kurikulum atau rencana pembelajaran untuk mata pelajaran agama disusun oleh Departemen Agama dan kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah terkait.

---

<sup>11</sup> Ibid.

3. Pelajaran agama dicantumkan secara resmi dalam jadwal pelajaran di setiap sekolah.<sup>12</sup>

Sementara itu, di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), mata pelajaran Pendidikan Agama atau Budi Pekerti semula diklasifikasikan sebagai pelajaran dasar, namun kemudian dialihkan ke kategori pelajaran pelengkap. Alokasi waktu yang diberikan adalah dua jam pelajaran per minggu untuk setiap kelas, tanpa membedakan jurusan sejak kelas II. Ciri khas dari Rencana Pendidikan tahun 1964 adalah keberadaan pelajaran agama sebagai pilihan. Apabila seorang siswa memilih untuk tidak mengikuti pelajaran agama, maka ia diwajibkan untuk mengikuti pelajaran Budi Pekerti sebagai alternatif.<sup>13</sup>

Dari paragraf diatas disimpulkan bahwa, di tingkat SMA, pelajaran Pendidikan Agama awalnya dianggap sebagai pelajaran utama, tapi kemudian digolongkan sebagai pelajaran tambahan. Setiap kelas mendapat dua jam pelajaran agama per minggu, tanpa melihat jurusan.

Meskipun pendidikan agama telah diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Sekolah Menengah Atas penerapannya di tingkat di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi negeri umum, baru dimulai pada tahun 1960. Kebijakan ini didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor II/MPRS/1960. Dalam Bab II, Pasal 2, Ayat 3 ketetapan tersebut ditegaskan bahwa pendidikan agama ditetapkan sebagai mata pelajaran di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri. Namun, ketentuan tersebut juga memberikan hak kepada siswa atau mahasiswa untuk tidak mengikuti pelajaran agama, apabila terdapat keberatan yang disampaikan oleh wali murid atau oleh siswa yang telah dewasa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

Disini dapat dikatakan bahwa, walaupun pelajaran agama sudah diajarkan di tingkat dasar dan menengah, baru pada tahun 1960 pendidikan agama mulai diterapkan di perguruan tinggi negeri. Hal ini berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang menyatakan bahwa pendidikan agama harus diajarkan di semua jenjang, dari SD sampai universitas. Namun, mahasiswa atau siswa tetap diberi hak untuk tidak ikut pelajaran agama jika mereka atau orang tuanya keberatan.

Melihat kondisi sosial dan politik Indonesia pada tahun 1960, dapat dipahami bahwa perluasan kebijakan Pendidikan Agama hingga jenjang perguruan tinggi didasarkan pada kerangka ideologi Nasakom sebuah gagasan politik yang menjadi dasar pijakan pemerintahan saat itu. Kebijakan ini muncul sebagai bentuk kompromi untuk mengakomodasi aspirasi tiga kekuatan besar di masyarakat, yaitu kelompok agamis (khususnya umat Islam), nasionalis, dan komunis. Oleh karena itu, meskipun pemerintah mewajibkan institusi pendidikan negeri untuk mencantumkan Pendidikan Agama dalam kurikulum, keikutsertaan mahasiswa dalam mata kuliah tersebut bersifat opsional. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin mengikuti pelajaran agama atau tidak. Dalam hal ini, tampak bahwa inti dari kebijakan tersebut adalah memberikan ruang bagi umat Islam untuk mendapatkan pendidikan agama dari negara, sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak mereka.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, pada tahun 1960, pemerintah memperluas kebijakan pendidikan agama sampai ke perguruan tinggi sebagai bagian dari ideologi Nasakom, yang menggabungkan kepentingan kelompok Islam, nasionalis, dan komunis. Meskipun pelajaran agama dimasukkan dalam kurikulum, mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih ikut atau tidak. Intinya, kebijakan ini

---

<sup>15</sup> Ibid.

dibuat untuk memenuhi hak umat Islam agar bisa mendapatkan pendidikan agama dari negara, tanpa memaksakan kepada semua pihak.

Dalam hal substansi materi, pelaksanaan Pendidikan Agama di perguruan tinggi umum pada masa itu belum diatur secara rinci. Penentuan materi ajar diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Fokus perhatian pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, lebih tertuju pada pendidikan agama di jenjang sekolah. Hal ini tercermin, misalnya, melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang lebih banyak mengatur ketentuan pendidikan agama untuk tingkat dasar dan menengah.<sup>16</sup>

Dari paragraph diatas dapat disimpulkan bahwa, pada masa itu, isi atau materi Pendidikan Agama di perguruan tinggi belum diatur secara jelas, sehingga setiap kampus bebas menentukan sendiri. Pemerintah lebih fokus mengatur pendidikan agama di jenjang sekolah dasar dan menengah, seperti yang terlihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah.

## **2. Tantangan Ideologis Terhadap Pendidikan Islam**

Ideologi adalah cara berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar yang dianut oleh suatu kelompok sosial atau budaya. Sementara itu, pendidikan Islam adalah upaya yang lebih fokus untuk membantu seseorang memahami, meresapi, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dalam praktiknya, pendidikan Islam perlu melakukan pemahaman ulang dan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang diajarkan. Hal ini penting karena pendidikan harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan zaman.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Indra Wijaya and Syaifuddin Sabda, "Filosofi, Ideologi Dan Paradigma Pendidikan Islam Inter, Multi Dan Transdisipliner," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 55–77, doi:10.47732/alfalahjikk.v23i1.176.

Dengan ini pernyataan diatas menyoroti bahwa ideologi merupakan fondasi berpikir, nilai, dan sikap suatu kelompok sosial atau budaya. Di sisi lain, pendidikan Islam secara spesifik berorientasi pada pemahaman, internalisasi, dan pengamalan ajaran Islam. Ini menekankan perlunya reinterpretasi dan adaptasi nilai-nilai dalam pendidikan Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Menurut Achmadi, pendidikan Islam mencakup segala upaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia agar menjadi pribadi yang baik dan sempurna sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang disampaikan oleh M. Natsir, Islam itu mencakup kehidupan masyarakat dan budaya, jadi tidak bisa dipahami secara sempit. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan antar sesama manusia, dengan lingkungan, dan kehidupan sosial secara umum, selama semuanya diatur oleh wahyu dari Allah SWT. Singkatnya, Islam mengajarkan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama, demi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>18</sup>

Achmadi mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya dalam mengembangkan potensi manusia menjadi pribadi yang baik dan sempurna sesuai ajaran Islam. Senada dengan itu, M. Natsir menekankan bahwa Islam memiliki cakupan yang luas, meliputi aspek kemasyarakatan dan kebudayaan, tidak hanya terbatas pada ritual individu. Islam mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk relasi dengan Tuhan, sesama, lingkungan, dan sosial, yang semuanya berlandaskan wahyu Allah SWT. Intinya, Islam membimbing manusia dalam menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Seiring perkembangan zaman, muncul pertanyaan tentang bagaimana isi atau inti dari ideologi pendidikan Islam di tengah persaingan global. Menurut

---

<sup>18</sup> Ibid.

Achmadi, secara prinsip dasar sebenarnya tidak perlu diubah karena nilai-nilai Islam bersifat mutlak dan diyakini kebenarannya. Namun, agar pendidikan Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman, perlu dilakukan pemahaman ulang terhadap nilai-nilai tersebut, termasuk cara memahaminya di masa lalu. Tujuannya adalah agar bisa merumuskan strategi pendidikan Islam yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman dan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.<sup>19</sup>

Saat ini, ada tiga tantangan besar yang sedang dihadapi. Pertama, bagaimana menjaga pencapaian yang sudah diraih agar tidak hilang di tengah krisis. Kedua, dunia pendidikan sekarang sudah masuk dalam persaingan global, di mana persaingan itu terjadi di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Ketiga, perlu ada perubahan dan penyesuaian dalam sistem pendidikan nasional agar lebih demokratis, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong keterlibatan Masyarakat. Meskipun pendidikan Islam dianggap ideal karena dasar-dasarnya berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para tokoh besar Islam, kenyataannya masih banyak masalah yang dihadapi. Masalah-masalah ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas umat Islam yang dilahirkan dari lembaga pendidikan Islam. Akibatnya, umat Islam tertinggal dalam persaingan global. Masalah dalam pendidikan Islam tidak hanya satu dan tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan.<sup>20</sup>

Menurut Achmadi, masalah utama pendidikan nasional termasuk pendidikan Islam adalah rendahnya kualitas pendidikan, yang menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini berujung pada lemahnya karakter bangsa. Masalah lain yang juga dihadapi oleh pendidikan Islam meliputi masalah ideologi, adanya dualisme sistem pendidikan, bahasa, serta metode pembelajaran. Masalah ideologi ini berkaitan dengan lemahnya kesadaran dan komitmen sebagian umat

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Miswar Saputra and Murdani Murdani, "Society 5.0 Sebagai Tantangan Terhadap Pendidikan Islam," *ISLAMIC PEDAGOGY: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 132–45, doi:10.52029/ipjie.v1i2.158.

Islam untuk mengaitkan ilmu pengetahuan dengan kemajuan teknologi. Akibatnya, semangat menuntut ilmu terutama dalam bidang sains belum menjadi budaya di kalangan umat Islam. Pemahaman Islam yang sempit dan tidak menyeluruh juga menjadi alasan mengapa ilmu pengetahuan tidak menjadi prioritas. Masalah ini sangat serius dan berdampak pada rendahnya serta tidak meratanya kMeskipun pendidikan Islam dianggap ideal karena bersumber dari ajaran Islam, penulis menyatakan bahwa kenyataannya masih banyak masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas umat Islam lulusan lembaga pendidikan Islam, sehingga tertinggal dalam persaingan global.<sup>21</sup>

Menurut penulis, mengutip Achmadi, masalah utama pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam, adalah rendahnya kualitas pendidikan yang berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan lemahnya karakter bangsa. Selain itu, pendidikan Islam juga menghadapi masalah ideologi (lemahnya kesadaran akan keterkaitan ilmu dan teknologi), dualisme sistem pendidikan, bahasa, dan metode pembelajaran. Masalah ideologi ini menyebabkan kurangnya semangat menuntut ilmu, terutama sains, di kalangan umat Islam akibat pemahaman Islam yang sempit. Hal ini berdampak serius pada rendahnya dan tidak meratanya kualitas generasi muda Muslim.

Pendidikan Islam saat ini sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ideologi. Jika tidak disikapi dengan bijak, perkembangan ini bisa menjadi ancaman bagi masa depan ideologi nasional yang berdasarkan Pancasilaualitas generasi muda Muslim.<sup>22</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional harus berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam harus

---

<sup>21</sup> Toto Suharto, "Remoderasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Tantangan Ideologis," *Pidato Pengukuhan Guru Besar, IAIN Surakarta*, no. February (2020): 7.

<sup>22</sup> Ibid.

berakar pada nilai-nilai agama, budaya nasional, dan terbuka terhadap perubahan zaman, tetapi tetap berpijak pada dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam kenyataannya, lembaga pendidikan Islam kini terfragmentasi secara ideologis. Sekolah atau madrasah negeri cenderung mengikuti ideologi negara, yakni Pancasila.<sup>23</sup>

Namun, sekolah Islam swasta sering kali mengikuti ideologi organisasi atau yayasan yang mendirikanannya. Tak jarang, sekolah-sekolah swasta ini menjadi media penyebaran ideologi tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila. Kondisi ini menjadi lebih serius ketika lembaga pendidikan tersebut berafiliasi dengan jaringan Islam transnasional, seperti gerakan Salafi. Melalui pengajaran yang tersembunyi (*hidden transcript*), mereka menyisipkan agenda ideologis seperti pendirian negara Islam atau penerapan syariah secara menyeluruh, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi dan ideologi nasional. Dalam suasana demokrasi pasca-Orde Baru, kelompok Islamis memanfaatkan kebebasan ini untuk menyebarkan ideologi mereka dan menolak Pancasila secara diam-diam. Mereka bahkan mulai menyusup ke madrasah swasta, di mana ada yang secara tersirat menolak pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena di dalamnya terdapat ajaran tentang Pancasila.<sup>24</sup>

Dari paragraf di atas penulis mengidentifikasi adanya ancaman terhadap kesatuan ideologis pendidikan nasional akibat perbedaan orientasi ideologi antara lembaga pendidikan Islam negeri dan swasta, terutama dengan adanya pengaruh ideologi transnasional yang disebarkan secara tersembunyi dan penolakan diam-diam terhadap Pancasila di beberapa lembaga pendidikan Islam.

Tantangan ideologis yang dihadapi saat ini seharusnya bisa menjadi peluang bagi kelompok Islam moderat untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan melakukan remoderasi atau pembaruan

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

pemikiran dan pendekatan pendidikan Islam agar sesuai dengan nilai-nilai moderat. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.<sup>25</sup>

Banyak penelitian menyebutkan bahwa organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) adalah contoh Islam moderat. Watak moderat ini terlihat dari berbagai kebijakan pendidikan yang mereka buat. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga pendidikan Muhammadiyah dan NU berlandaskan ideologi Islam moderat, mereka tetap menghadapi persaingan dengan lembaga pendidikan lain yang menganut ideologi tidak moderat.<sup>26</sup>

Azyumardi Azra mengatakan bahwa salah satu tantangan besar pendidikan Islam adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai, baik dari kalangan dosen maupun tenaga administrasi. Banyak dari mereka belum bersikap proaktif dan masih berpikir dengan cara lama yang terlalu bergantung pada petunjuk teknis atau aturan, tanpa berani membuat inovasi atau terobosan baru. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM masih lemah dan kurang kreatif. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sofyan Effendi. Ia menyebut bahwa tantangan pendidikan Islam saat ini adalah globalisasi dan lemahnya kualitas SDM. Karena itu, pendidikan Islam harus mampu menghadapi tantangan global dengan cara memperkuat kualitas sumber daya manusianya agar bisa bersaing di masa depan.<sup>27</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa, berdasarkan pandangan Azyumardi Azra dan Sofyan Effendi, tantangan signifikan dalam pendidikan Islam terletak pada lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Azra menyoroti kurangnya tenaga pendidik dan tenaga administrasi yang proaktif dan inovatif, masih terikat pada

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Sutikno, "Kritik Ideologis Dalam Pendidikan Islam," *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2023): 40–50, doi:10.58518/darajat.v6i1.1765.

<sup>27</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Tantangan Pendidikan Islam," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

cara kerja lama. Senada dengan itu, Effendi menekankan bahwa globalisasi memperparah tantangan ini, sehingga penguatan kualitas SDM menjadi krusial bagi pendidikan Islam agar mampu bersaing di masa depan.

### **3. Adaptasi Pendidikan Islam dalam Sistem Demokrasi Terpimpin**

Di tengah krisis, diambil langkah pertama yang disebut oleh Soekarno “demokrasi terpimpin” sebagai bentuk pemerintahan. Ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap dan dinamis. Sistem itu berasal dari krisis dan terus berkembang tanpa henti. Inilah yang paling bermasalah dalam sejarah yang Indonesia alami semenjak era Revolusi.

Seiring berkembangnya proses demokrasi di Indonesia, muncul pula istilah “demokrasi yang religious”. Istilah satu ini merupakan gabungan dari dua konsep. Pertama, substansi demokrasi itu sendiri dan kedua penghormatan terhadap nilai agama dan budaya lokal di Indonesia. Mencakup arti “religious” ada beberapa agama yang diakui secara formal di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Menurut Masykuri Abdillah, konsep demokrasi yang religius memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kehendak rakyat semestinya atau sedapat mungkin tidak bertentangan dengan silaKetuhanan Yang Maha Esa.
- b. Keputusan-keputusan public semestinya dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan manusia maupun Tuhan,
- c. Orientasi setiap individu semestinya tidak hanya menekankan hak-hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban,
- d. Pemeliharaan keseimbangan antara hak-hak individual dan kolektif serta antara nilai-nilai material dan spiritual.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Munah et al., “Dinamika Islam Di Indonesia: Kebijakan Politik Terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pasca Merdeka-Reformasi.”

demikian, Masykuri Abdillah adalah seorang pemikir yang menggagas konsep "demokrasi yang religious" di Indonesia. Beliau mendefinisikan konsep ini sebagai sistem demokrasi yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya lokal yang berlaku di Indonesia, dengan tetap mempertahankan esensi demokrasi itu sendiri. Konsep ini mengakomodasi seluruh agama yang diakui secara formal di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Menurut Abdillah, terdapat empat kriteria utama dalam demokrasi yang religious: keselarasan kehendak rakyat dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, akuntabilitas keputusan publik di hadapan manusia dan Tuhan, penekanan pada hak dan kewajiban individu, serta keseimbangan antara hak individual dan kolektif serta nilai material dan spiritual.<sup>29</sup>

Partai-partai Islam melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan Soekarno, tetapi secara keseluruhan partai-partai tersebut mengalami kemerosotan.<sup>30</sup> Tidak ada jabatan menteri yang memiliki posisi penting yang diserahkan kepada partai Islam, tidak seperti yang terjadi di masa demokrasi Perlementer. Satu-satunya kepentingan Islam yang dicapai adalah keputusan MPRS tahun 1960 yang memberlakukan pengajaran agama di Universitas dan Perguruan Tinggi. Di lain sisi, Islam tradisional tampak lebih mampu menyesuaikan diri dengan keadaan politik yang berubah-ubah dan mempertahankan kekuatan dan daya tahannya di daerah pedalaman. Sementara itu, angkatan baru para tokoh Islam sedang muncul, dan mereka terkadang tidak senang dengan kepemimpinan yang dicontohkan para tokoh tua. Mereka juga kurang memperhatikan isu-isu lama, tentang perpecahan antara ortodoks dengan modernis, atau tentang kesulitan hidup dalam masyarakat yang semakin multiagama.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

Dalam pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Belajar di sekolah Agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”. Selain itu, pasal yang dianggap diskriminatif antara pendidikan umum dengan Pendidikan agama terdapat pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah- sekolah agama dan pendidikan masyarakat.”<sup>32</sup>

Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam keputusan presiden nomor 145 Tahun 1965 adalah sebagai berikut : Tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan pra sekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang asusila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila. Kebijakan pendidikan pada waktu itu yaitu, “Septa Usaha Tama Dan Panca Wardhana” tertuang dalam instruksi Menteri PP&K Nomor 1 Tahun 1959. Septa Usaha Tama berisi :

- a. Penertiban aparatur dan usaha-usaha kementerian PP&K
- b. Menggiatkan kesenian dan olahraga
- c. Mengharuskan “usaha halaman”
- d. Mengharuskan penabung
- e. Mewajibkan usaha-usaha koperasi
- f. Mengadakan “kelas masyarakat”
- g. Membentuk “regu kerja” di kalangan SLA dan Universitas.<sup>33</sup>

Pendidikan Islam sudah ada di Indonesia sejak negara ini belum merdeka.

Secara historis, pendidikan Islam mulai muncul dan diprakarsai oleh para ulama

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Y Suryanti, “Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Era Demokrasi Liberal Dan Demokrasi Terpimpin,” *Misbahul Ulum (Jurnal Institusi)* 3, no. 1 (2020): 37–51,  
<http://jurnal.stitmugu.ac.id/index.php/misbahul/article/view/20%0Ahttp://jurnal.stitmugu.ac.id/index.php/misbahul/article/download/20/15>.

dan Kiai di kampung-kampung melalui bentuk pesantren, masjid dan surau-surau, dengan mengajarkan dan mengkaji al-Quran, aqidah dan tauhid. Namun seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya para ulama dan pelajar Indonesia yang bersekolah di Mekkah dan beberapa daerah di Timur Tengah, maka sepulangnya dari sana mereka berusaha untuk memperkenalkan dan mempraktekkan pendidikan yang telah mereka dapatkan di Timur Tengah tersebut, yaitu dengan sistem klasikal. Maka setelah itu dikenallah istilah Madrasah, yang merupakan bentuk lembaga pendidikan formal Islam pada masa itu, yang sebenarnya saat itu untuk menyaingi lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuk penjajah (Pemerintah Belanda) yang mana lembaga-lembaga pendidikan bentukan Belanda tersebut hanya diperuntukkan untuk kalangan bangsawan. Madrasah ini memosisikan diri sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi kaum pribumi untuk memperoleh pendidikan, yang semuanya itu dilakukan secara mandiri.<sup>34</sup>

Pendidikan Islam di Indonesia pada awalnya tumbuh secara organik melalui pesantren, masjid, dan surau oleh para ulama dan kiai di pedesaan, dengan fokus pada pengajaran dasar-dasar agama. Namun, setelah para pelajar dan ulama Indonesia pulang dari Timur Tengah, mereka membawa sistem pendidikan baru yang lebih terstruktur dan klasikal, yang kemudian melahirkan madrasah sebagai bentuk pendidikan formal Islam.<sup>35</sup> Madrasah ini tidak hanya menjadi sarana penyebaran ilmu agama, tetapi juga muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang eksklusif, dengan menyediakan pendidikan bagi masyarakat pribumi secara mandiri dan inklusif.

Disini dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah eksis jauh sebelum kemerdekaan. Awalnya dipelopori oleh ulama dan kiai melalui

---

<sup>34</sup> Sukma Umbara Tirta Firdaus, "Demokrasi Pendidikan Ala Soekarno.Pdf" 1, no. 1 (2016).

<sup>35</sup> Rahmat Hidayat et al., "Realita Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perkembangan, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan," *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 188–204.

pesantren, masjid, dan surau dengan fokus pada pengajaran Al-Qur'an, akidah, dan tauhid. Seiring waktu, pengaruh pendidikan dari Timur Tengah yang dibawa oleh para ulama dan pelajar yang kembali dari sana memperkenalkan sistem klasikal yang kemudian melahirkan madrasah. Madrasah pada masa itu berfungsi sebagai alternatif pendidikan formal bagi masyarakat pribumi, berdiri secara mandiri sebagai respons terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang eksklusif bagi kaum bangsawan.

Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai perubahan signifikan dalam kebijakan politik nasional yang kemudian menggeser tujuan pendidikan Indonesia dari pembentukan warga negara yang bermoral, cakap, demokratis, dan bertanggung jawab menjadi penciptaan tenaga ahli yang sesuai dengan ideologi Manipol USDEK dan konsep manusia sosialis Indonesia yang berbudi pekerti luhur. Kebijakan ini tercermin dalam TAP MPRS No. II/MPRS/1960 yang mengarahkan pendidikan untuk mengembangkan aspek mental, keagamaan, dan kebudayaan, memperkuat identitas bangsa, serta menolak pengaruh negatif asing, yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai instruksi menteri dan perubahan kurikulum di setiap jenjang pendidikan, termasuk penegasan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib namun dengan pengecualian bagi yang berkeberatan, serta integrasinya dalam kerangka ideologi negara meskipun dengan porsi dan penekanan yang berbeda di setiap tingkatan sekolah.

Ideologi merupakan landasan nilai dan cara berpikir suatu kelompok, sementara pendidikan Islam bertujuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan perlunya adaptasi terhadap perkembangan zaman. Meskipun pendidikan Islam memiliki dasar ideal dari ajaran agama, realitasnya menunjukkan adanya permasalahan kualitas SDM, ideologi, dualisme sistem, bahasa, dan metode pembelajaran yang menyebabkan rendahnya mutu lulusan dan ketertinggalan dalam persaingan global. Lebih lanjut, penulis menyoroti adanya tantangan ideologis berupa potensi ancaman terhadap ideologi nasional Pancasila akibat perbedaan orientasi

ideologi antara lembaga pendidikan Islam negeri dan swasta, terutama dengan infiltrasi ideologi transnasional. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya penguatan pendidikan Islam moderat dan peningkatan kualitas SDM agar pendidikan Islam dapat menjawab tantangan zaman dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan.

periode kepemimpinan Soekarno diwarnai oleh transisi menuju "demokrasi terpimpin" sebagai respons terhadap krisis, sebuah sistem yang dinamis dan problematis dalam sejarah Indonesia pasca-revolusi. Di tengah perkembangan demokrasi ini, muncul konsep "demokrasi yang religious" yang digagas oleh Masykuri Abdillah, menekankan integrasi nilai agama dan budaya lokal dalam sistem demokrasi dengan empat kriteria utama. Meskipun demikian, partai-partai Islam mengalami penurunan pengaruh politik pada masa ini, dengan satu-satunya capaian signifikan adalah pemberlakuan pengajaran agama di perguruan tinggi, sementara Islam tradisional justru menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih baik. Di sisi lain, pendidikan Islam di Indonesia telah eksis jauh sebelum kemerdekaan melalui pesantren dan surau, kemudian berkembang menjadi madrasah sebagai respons terhadap sistem pendidikan kolonial, menunjukkan akar kuat dan kemandirian pendidikan Islam di tanah air.

### Daftar Rujukan

- Firdaus, Sukma Umbara Tirta. "Demokrasi Pendidikan Ala Soekarno.Pdf" 1, no. 1 (2016).
- Hamka, Hamka. "Dinamika Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum." *Scolae: Journal of Pedagogy* 1, no. 1 (2018): 92–100. doi:10.56488/scolae.v1i1.16.
- Hidayat, Rahmat, Ridhatul Husna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. "Demokrasi Pendidikan Islam (Dan Analisis Pengembangannya)." *Educational Journal of Islamic Management* 3, no. 1 (2023): 13–26. doi:10.47709/ejim.v3i1.2294.
- Hidayat, Rahmat, Khairun Nisa, Muhammad Zaini, Dewi Safitri, and Baiq Ida Astini. "Realita Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perkembangan, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan." *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 188–204.

- Munah, Mae, Eni Suhaeni, Nas Rullah, and Asep Abdurrohman. "Dinamika Islam Di Indonesia: Kebijakan Politik Terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pasca Merdeka-Reformasi." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 18, no. 1 (2022). doi:10.31000/rf.v18i1.6058.
- Nadhif Muhammad Mumtaz. "Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 414. file:///E:/Kebijakan Pendidikan/kebijakan pendidikan menurut KH. Zenal Arifin.pdf.
- Rusdiana, A. "Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023," 2023, 89–104.
- Saputra, Deby Abiyanto, Nur Azizah, and Pangi Syarwi. "K.H Saifuddin Zuhri, Dinamika Islam Moderat, Dan Demokrasi Terpimpin." *Communitarian : Jurnal Prodi Ilmu Politik* 5, no. 1 (2023): 805–19.  
<https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/433>.
- Saputra, Miswar, and Murdani Murdani. "Society 5.0 Sebagai Tantangan Terhadap Pendidikan Islam." *ISLAMIC PEDAGOGY: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 132–45. doi:10.52029/ipjie.v1i2.158.
- Suharto, Toto. "Remoderasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Tantangan Ideologis." *Pidato Pengukuhan Guru Besar, IAIN Surakarta*, no. February (2020): 7.
- Suryanti, Y. "Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Era Demokrasi Liberal Dan Demokrasi Terpimpin." *Misbahul Ulum (Jurnal Institusi)* 3, no. 1 (2020): 37–51.  
<http://jurnal.stitmugu.ac.id/index.php/misbahul/article/view/20%0Ahttp://jurnal.stitmugu.ac.id/index.php/misbahul/article/download/20/15>.
- Sutikno. "Kritik Ideologis Dalam Pendidikan Islam." *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2023): 40–50. doi:10.58518/darajat.v6i1.1765.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Tantangan Pendidikan Islam." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Wijaya, Indra, and Syaifuddin Sabda. "Filosofi, Ideologi Dan Paradigma Pendidikan Islam Inter, Multi Dan Transdisipliner." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 55–77. doi:10.47732/alfalahjikk.v23i1.176.